



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DAN  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

**I N S P E K T O R A T**

**KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2022**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latarbelakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>4</b>
2.1. Visi .....	4
2.2 Misi .....	4
2.3 Tujuan Perangkat Daerah .....	5
2.4 Data Umum Organisasi .....	6
2.6 Struktur Organisasi .....	6
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA .....</b>	<b>8</b>
3.1. Indikator Kinerja .....	8
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>11</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



---

---

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran .....	8
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama .....	9
Tabel 3 Target Kinerja Perubahan Inspektorat Tahun 2022 .....	10



---

---

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi ..... 7



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Data Umum Organisasi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon menyebutkan bahwa Inspektorat adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Cirebon.

#### 1.2 Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - c. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan.
2. Inspektur Pembantu I
3. Inspektur Pembantu II
4. Inspektur Pembantu III
5. Inspektur Pembantu IV
6. Inspektur Pembantu Khusus

#### 1.3 Dasar Hukum Organisasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);



3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 20, Seri D);
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 23, Seri D).



#### **1.4 Aspek Strategis Organisasi**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah ini dimaksudkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih fokus menyelenggarakan Otonomi Daerah berdasarkan urusannya masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu upaya agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.

Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang berkaitan dengan urusan penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu pengawasan.

#### **1.5 Isu Strategis Organisasi**

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan reguler, pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan khusus terhadap Perangkat Daerah (PD) yang strategis yaitu instansi-instansi penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah);
2. Melakukan pembinaan kepada aparatur PD atau desa untuk melaksanakan tata kelola administrasi umum maupun keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mendorong kepada PD dan desa agar meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Meminimalisir terhadap kegiatan-kegiatan PD yang berindikasi dapat merugikan keuangan daerah/negara;
5. Meningkatkan kualitas pengawasan maupun pemeriksaan agar Laporan Hasil Pemeriksaan dapat digunakan oleh Bupati atau pihak berwajib sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan;
6. Membina SDM Inspektorat Kabupaten Cirebon baik melalui diklat formal sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat P2UPD, diklat Ketua Tim, maupun bimbingan teknis dengan materi yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan;



7. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Propinsi Jawa Barat, BPKP Perwakilan Jawa Barat, BPK-RI Perwakilan di Bandung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar pemeriksaan lebih efektif dan berhasil guna;
8. Mendorong terbentuknya Satuan Tugas SPIP pada setiap PD agar berfungsi dengan baik;
9. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan menjalin komunikasi dengan obyek pemeriksa agar meningkatkan kesadaran untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu;
10. Bersama dengan PD yang lain mengupayakan agar Opini WTP dari BPK dapat dicapai;
11. Membentuk Satgas OTT tingkat Kabupaten Cirebon agar kegiatan yang bersifat KKN dapat diminimalisir.

## 1.6 Tujuan

Tujuan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

### **"Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih "**

Ruang lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah seluruh SKPD, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon.

## 1.7 Sasaran

Sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi, dengan indikator kinerja nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon; dan





3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### 1.8 Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah Inspektorat Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

**Tabel. 1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat**

No	Tujuan	Sasaran	
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih	1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
		2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi
		3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

### 1.9 Indikator Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome*, keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja *outcome* belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Indikator kinerja *input* yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang. Indikator *output* yang digunakan nampak



bervariasi, hal itu disesuaikan dengan jenis sasaran yang ditetapkan seperti LHP yang diterbitkan, buku-buku yang diterbitkan dan pengadaan barang yang dihasilkan, begitu juga dalam hal indikator kinerja *outcome* bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai walaupun demikian adanya, tersebut juga kesamaan dalam memformulasikan indikator kinerja *outcome* yang intinya adalah kinerja tersebut harus menggambarkan sejauh mana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh pimpinan maupun *stakeholders* lainnya.

**Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

No	SASARAN	No	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	1	nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon;
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

### 1.10 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Adalah faktor penting dalam proses perencanaan strategis cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi yang dibangun ini dilandasi kepada informasi dan data-data yang diperoleh dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana akan dikemukakan berikut :

**Tabel 3 Staregi dan Program**

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan jumlah ODP yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan tata Kelola pemerintah yang baik melalui revitalisasi system birokrasi yang bersih dan akuntabel</li> </ul>
Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	1. Meningkatkan integritas perencanaan, pemnganggaran, pengawsan dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan system perencanaan, pemnganggaran, pengawsan dan pelaporan yang terintegrasi berbasis elektronik</li> </ul>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah	1. Meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapasitas sumber daya aparatur</li> </ul>

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

### 1.11 Program dan Kegiatan

Indikator kinerja tersebut diimplementasikan dalam program-program. Adapun program yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.



## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 2.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

##### 2.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Dalam tahun anggaran 2021 sebanyak 3 (tiga) sasaran telah dilaksanakan dengan hasil capaian sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	55	56
2	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	70	72
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86	97.28

##### 1.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	55	56	55	56
2	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	65	72	70	72
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85	98.75	85	97.28

##### 2.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Inspektorat dalam rangka meningkatkan kinerjanya adalah :

1. Mempertahankan sekaligus mengembangkan kinerja yang efektif dan efisien;
2. Mengembangkan sistem pengumpulan data yang terintegrasi, sehingga memudahkan untuk pengukuran kinerja;
3. Mengadakan evaluasi dan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang masih kurang baik.



#### 2.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan dari suatu input tertentu. Efisiensi ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Nilai efisiensi terhadap penggunaan dana anggaran tersebut adalah sebesar **Rp. 2.651.226.293** -. Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja operasional dinas sebesar **Rp. 22.054.474.281- Rp. 20.054.474.281 = Rp. 2.651.226.293 atau 11,68%** dari total belanja fisik tahun anggaran 2020.

Selain analisis efisiensi, juga dilakukan analisis efektifitas dengan dengan cara membandingkan antara hasil dengan keluaran yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, kinerja dinas dalam melaksanakan kegiatan mempunyai nilai efektifitas 100%.

#### 2.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 16,873,589,574.- dan terealisasi sebesar Rp. 15,715,927,498.- atau tercapai sebesar 93,14%. Sisa sebesar Rp. 1,157,662,076.-. Program ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:
  - 1) SubKegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14,528,100.- dan terealisasi sebesar Rp. 14,242,000- atau tercapai sebesar 92,68%. sisa sebesar Rp. 286,100.- merupakan sisa pengadaan atk Output 2 (dua) dokumen RENSTRA, RENJA. **Outcome** kegiatan ini adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 2) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 544.431.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 539.176.000,00 dengan sisa



anggaran sebesar Rp. 5.255.200,00 atau tercapai sebesar 99,03%. Output kegiatan ini adalah 18 jenis perlatan dan perlengkapan kantor. Outcome Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Rp. 4.030.779.100.- dan terealisasi sebesar Rp. 3.308.574.300.- sisa sebesar Rp. 722.204.800.- atau tercapai sebesar 82.08 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - 1) SubKegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 209.003.400.- dan terealisasi sebesar Rp. 207.137.400.- atau tercapai sebesar 99,09%. sisa sebesar Rp. 1.896.000.-, Output kegiatan ini adalah Audit Keuangan Dana BOS SMP (32 obrik), Audit Keuangan Dana BOS SD (64 obrik). Outcome ini adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
  - 2) SubKegiatan Pengawasan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 718.127.500.- dan terealisasi sebesar Rp. 716.734.500.- atau tercapai sebesar 99,81%. sisa sebesar Rp. 1.393.000.-, Output kegiatan ini adalah Audit Dana Desa (203); Audit Dana Kelurahan (5). Outcome ini adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.801.331.900.-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.029.972.483.-**, sisa sebesar **Rp. 771.359.417.-** atau tercapai sebesar **57,18%**. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
  - 1) SubKegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan alokasi anggaran Rp. 104.657.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.309.900.-, sisa sebesar Rp. 54.347.300.-, Output Subkegiatan ini adalah 1 Laporan PMPRB. Outcome kegiatan ini adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan.



- 2) SubKegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 1.061.483.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 416.476.098.-, sisa sebesar Rp. 645.007.802.-, Output Subkegiatan ini adalah Diklat PPUPD, Diklat Auditor Madya, Diklat Substantif (Arsiparis, Manajemen Pengawasan). Outcome kegiatan ini adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

## **2.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021**

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Cirebon. Secara umum anggaran yang ada pada Inspektorat Kabupaten Cirebon terbagi menjadi anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Adapun anggaran belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai. Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan dan ditujukan untuk masyarakat yang terdiri dari sembilan sasaran sebagaimana tersebut di atas.

Anggaran belanja operasi Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 22.705.700.574,- sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 23.154.377.400,-. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar Rp. 448.676.826,- atau 1,93% dari belanja daerah Tahun 2021. Adapun realisasi belanja oprasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 18.925.607.822 atau 81.74% dari total belanja daerah tahun 2020. Sedangkan realisasi belanja langsung Tahun 2021 sebesar Rp. 20.054.474.281 atau 88,32% dari total belanja Tahun 2021. Sehingga secara keseluruhan dapat diketahui bahwa realisasi belanja langsung pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun 2020.

**Tabel 4. Komposisi Keuangan dan Realisasi Tahun 2021**

No	Uraian	Target (RP)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Pendapatan	-	-	-
B.	Belanja	22.705.700.574	20.054.474.281	<b>88,32</b>
B.1	Belanja Operasi	21.922.231.574	19.276.245.281	<b>87,93</b>
B.2	Belanja Modal	783.469.000	778.226.000	99,33
	Jumlah Belanja :	<b>22.705.700.574</b>	<b>20.054.474.281</b>	<b>88,32</b>
	Jumlah Pendapatan :	-	-	
	Defisit :	<b>22.705.700.574</b>	<b>20.054.474.281</b>	<b>88,32</b>





## **BAB III**

### **PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022**

#### **3.1 Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja**

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan dari suatu input tertentu. Efisiensi ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Nilai efisiensi terhadap penggunaan dana anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 2.651.226.293 -. Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja dinas sebesar Rp. 22.705.700.574 –Rp. 20.054.474.281 = Rp. 2.651.226.293 atau 11,68% dari total belanja tahun anggaran 2021.

Selain analisis efisiensi, juga dilakukan analisis efektifitas dengan dengan cara membandingkan antara hasil dengan keluaran yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, kinerja dinas dalam melaksanakan kegiatan mempunyai nilai efektifitas 100%.

#### **3.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2022**

Adapun perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



**Tabel 5 Perencanaan Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.533.332.374,00	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.429.200,00	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.650.000,00	2 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.847.600,00	1 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.117.100,00	1 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.640.200,00	1 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.392.500,00	1 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.608.200,00	3 Dok
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.173.600,00	1 Dok
				Administrasi Keuangan Perangkat		14.705.047.800,00	



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
				<b>Daerah</b>			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.659.250.000,00	68 Pegawai
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.149.800,00	12 Dok
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.822.200,00	12 Laporan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.163.200,00	1 Laporan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.662.600,00	1 Dok
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>11.002.300,00</b>	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.551.300,00	1 Dok
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.451.000,00	12 Laporan
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>596.366.200,00</b>	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.728.000,00	8 jenis



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.620.000,00	10 unit
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.361.000,00	12 unit
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.200.000,00	17 jamuan
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.025.600,00	12 jenis
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.997.000,00	2 jenis
					Penyediaan Bahan/Material	29.737.500,00	42 jenis
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.867.500,00	40 laporan
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.829.600,00	24 laporan
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>24.417.000,00</b>	
					Pengadaan Mebel	24.417.000,00	20 unit
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>144.734.400,00</b>	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.734.400,00	3 jenis
				<b>Pemeliharaan Barang Milik</b>		<b>1.001.335.474,00</b>	



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
				<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.827.800,00	10 unit
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.642.000,00	61 unit
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.330.000,00	21 unit
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	458.535.674,00	2000 m2
<b>2</b>	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			<b>4.616.155.100,00</b>	
				<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>3.313.072.400,00</b>	
					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	290.775.200,00	4 LHP
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	231.454.800,00	96 LHP



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
					Reviu Laporan Kinerja	525.543.200,00	1 Laporan
					Reviu Laporan Keuangan	217.097.800,00	1 Laporan
					Pengawasan Desa	862.490.700,00	212 LHP
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.185.710.700,00	80 LHP
				<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>1.303.082.700,00</b>	
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	168.750.500,00	20 LHP
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.134.332.200,00	60 LHP
<b>3</b>	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			<b>1.124.739.100,00</b>	
				<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>		<b>354.341.500,00</b>	
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	129.382.000,00	4 dokumen
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	224.959.500,00	12 laporan
				<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>770.397.600,00</b>	

Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Kinerja
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	328.793.600,00	32 SKPD
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	95.904.400,00	1 Dok
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	345.699.600,00	1 dok

Sumber : DPA Inspektorat Tahun 2022



**TABEL 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT**

<b>N O</b>	<b>SASARAN/OUTCOME/KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	INSPEKTUR	RENSTRA ISNPEKTORAT 2019-2024
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon;		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

**INSPEKTUR,  
KABUPATEN CIREBON**



**Drs. IYAN EDIYANA, MM., M.Si., CGCAE**

**NIP. 19661209 199312 1 002**





**TABEL 2. TARGET KINERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT TAHUN 2022**

No	SASARAN/OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	%	65
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon;	%	75
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	87

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024



**Drs. IYAN EDIYANA, MM., M.Si., CGCAE**

**NIP. 19661209 199312 1 002**



## BAB IV

### PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan rangka meyakinkan keandalan informasi IKU dalam yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing.

Dengan disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2022 diharapkan dapat mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya secara terciptanya suatu efisien, efektif, ekonomik "good governance", dan equity (Pemerintahan yang baik).

Perjanjian kinerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan kinerjanya adalah :

1. Mempertahankan sekaligus mengembangkan kinerja yang efektif dan efisien;
2. Mengembangkan sistem pengumpulan data yang terintegrasi, sehingga memudahkan untuk pengukuran kinerja;
3. Mengadakan evaluasi dan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang masih kurang baik.

Sumber, 17 Oktober 2022



**Drs. IYAN EDIYANA, MM., M.Si. CGCAE**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661209 199312 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
INSPEKTORAT**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si.  
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag  
Jabatan : B U P A T I C I R E B O N

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**Drs. H. IMRON, M.Ag**

Pihak Kesatu,

**Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661209 199312 1 002



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
INSPEKTORAT  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil penilaian BPKP dalam sistem INOSTRA	3.1 Poin	3.1 Poin
1.1.01.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Non Kumulatif	Meningkat	Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65 Poin	65 Poin
1.1.02.	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi Korupsi	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI	75 Prosen	75 Prosen
1.1.03.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Penilaian Masyarakat terhadap pelayanan	87 Prosen	87 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	899.452.700,00	1.101.914.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.616.155.100,00	4.117.485.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.02.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	225.286.400,00	142.086.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.533.332.374,00	18.705.484.325,00	Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-DAU, PAD,DTU-DAU, Pjk Pen Jln
<b>J U M L A H</b>		<b>22.274.226.574,00</b>	<b>24.066.970.525,00</b>	

Pihak Kedua  
BUPATICIREBON,

**Drs. H. IMRON, M.Ag**

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Inspektur,

**Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661209 199312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
INSPEKTORAT**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE.,M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si.  
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661209 199312 1 002

Pihak Kesatu,

**MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE.,M.Si.**

Pembina  
NIP. 19770713 200312 2 006





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
INSPEKTORAT  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil penilaian BPKP dalam sistem INOSTRA	3.1 Poin	3.1 Poin
1.1.01.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Non Kumulatif	Meningkat	Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65 Poin	65 Poin
1.1.02.	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi Korupsi	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI	75 Prosen	75 Prosen
1.1.03.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Penilaian Masyarakat terhadap pelayanan	87 Prosen	87 Prosen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kapabilitas APIP	$\frac{\text{jumlah temuan hasil pengawasan}}{\text{jumlah temuan yang ditarget}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	temuan hasil pengawasan	3 nilai	3 nilai	674.493.200,00	733.977.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
		persentase peningkatan SDM Pengawas berkompeten	$\frac{\text{jumlah SDM pengawas yang bersertifikat}}{\text{jumlah SDM pengawas seluruhnya}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	SDM Pengawas bersertifikat	76 Prosen	76 Prosen	224.959.500,00	367.937.200,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Pengawasan Internal	$\frac{\text{Jumlah pengawasan internal yang dilakukan}}{\text{Jumlah pengawasan internal yang direncanakan dalam PKPT}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100 Prosen	100 Prosen	4.616.155.100,00	4.117.485.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.02.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	$\frac{\text{jumlah pelaksanaan internal dan pengembalian terhadap SDP yang dilakukan}}{\text{jumlah pengawasan internal dan pengembalian kebutuhan ADM yang diperlukan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Sistem Pengawasan Internal	100 Prosen	100 Prosen	225.286.400,00	142.086.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\text{jumlah pelayanan yang disediakan}}{\text{jumlah pelayanan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	100 Prosen	15.858.283.900,00	17.669.355.100,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PAD, DTU-DAU, Pjk Pen Jln
		Meningkatnya persentase sarana dan prasarana aparatur	$\frac{\text{jumlah sarana dan prasarana yang disediakan}}{\text{jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	100 Prosen	100 Prosen	585.643.674,00	946.724.425,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jln

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya persentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	$\frac{\text{jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi}}{\text{jumlah laporan kinerja dan keuangan yang seharusnya di validasi}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	pelaporan kinerja dan keuangan	100 Prosen	100 Prosen	63.757.400,00	63.757.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jln
		Meningkatnya persentase sistem perencanaan sektoral yang transparan, akuntabel dan informatif	$\frac{\text{jumlah perencanaan sektoral yang dilakukan}}{\text{jumlah perencanaan sektoral yang seharusnya}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	laporan perencanaan sektoral	100 Prosen	100 Prosen	25.647.400,00	25.647.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jln
<b>J U M L A H</b>									<b>22.274.226.574,00</b>	<b>24.066.970.525,00</b>	

Pihak Kedua  
Inspektur,



**Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661209 199312 1 002

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Sekretaris Inspektorat,



**MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19770713 200312 2 006





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
INSPEKTORAT**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANA, S.IP.  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE.,M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE.,M.Si.**

Pembina

NIP. 19770713 200312 2 006

**YULIANA, S.IP.**

Penata Tk.I

NIP. 19791230 200901 2 001





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**INSPEKTORAT**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil penilaian BPKP dalam sistem INOSTRA	3.1 Poin	3.1 Poin
1.1.03.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Penilaian Masyarakat terhadap pelayanan	87 Prosen	87 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1.03.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>1.766.853.074,00</b>	<b>1.654.372.125,00</b>	
<b>1.1.03.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	<b>596.366.200,00</b>	<b>612.881.500,00</b>	-
1.1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 jenis	12 jenis	19.728.000,00	19.728.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit	10 unit	248.620.000,00	253.135.300,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 Unit	3 Unit	54.361.000,00	54.361.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	17 jamuan	24 jamuan	19.200.000,00	19.200.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	30.025.600,00	30.025.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	3 jenis	35.997.000,00	47.997.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	42 jenis	42 jenis	29.737.500,00	29.737.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan	40 laporan	152.867.500,00	152.867.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar	24 laporan	24 laporan	5.829.600,00	5.829.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.03.01.2.07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 BA	1 BA	24.417.000,00	24.417.000,00	-
1.1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang disediakan	20 unit	2 unit	24.417.000,00	24.417.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	144.734.400,00	144.734.400,00	-
1.1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis rekening	3 jenis	3 jenis	144.734.400,00	144.734.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk Pen Jln
1.1.03.01.2.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	1.001.335.474,00	872.339.225,00	-
1.1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan jumlah kendaraan yang diurus perijinannya	10 unit	10 unit	147.827.800,00	147.827.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan jumlah kendaraan yang diurus pajak kendaraannya	61 unit	54 unit	346.642.000,00	348.310.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	21 unit	21 unit	48.330.000,00	48.330.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	2000 m2	2000 m2	458.535.674,00	327.871.425,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>J U M L A H</b>					<b>1.766.853.074,00</b>	<b>1.654.372.125,00</b>	

Pihak Kedua  
Sekretaris Inspektorat,

**MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE.,M.Si.**

Pembina  
NIP. 19770713 200312 2 006

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada  
Sekretariat,

**YULIANA, S.I.P.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19791230 200901 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
INSPEKTORAT**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOKO GURUNING GEMI, ST, MT.  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE.,M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE.,M.Si.**

Pembina  
NIP. 19770713 200312 2 006

Pihak Kesatu,

**SOKO GURUNING GEMI, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19820128 200604 1 009





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
INSPEKTORAT  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil penilaian BPKP dalam sistem INOSTRA	3.1 Poin	3.1 Poin
1.1.01.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Non Kumulatif	Meningkat	Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65 Poin	65 Poin
1.1.02.	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi Korupsi	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI	75 Prosen	75 Prosen
1.1.03.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Penilaian Masyarakat terhadap pelayanan	87 Prosen	87 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.02.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	261.825.200,00	0,00	Sumber Dana:
1.1.02.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	129.382.000,00	0,00	Sumber Dana:
1.1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.452.137.900,00	0,00	Sumber Dana:
<b>J U M L A H</b>		<b>16.843.345.100,00</b>	-	

Pihak Kedua  
Sekretaris Inspektorat,

**MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE.,M.Si.**

Pembina

NIP. 19770713 200312 2 006

Sumber, Oktober 2022  
Pihak Kesatu  
Analisis Kebijakan Ahli Muda,

**SOKO GURUNING GEMI, ST, MT.**

Pembina

NIP. 19820128 200604 1 009